

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim)

Oleh

JENNI AGUSTIN

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak anak. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana di bawah minimum khusus terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mana aspek tersebut digunakan dalam kerangka teoritis pada penelitian ini. Aspek yuridis menjadi dasar pertimbangan utama Jaksa Penuntut Umum (JPU), tersebut mencakup keharusan untuk memastikan bahwa rumusan dari semua pasal yang digunakan telah sesuai. selain itu, pertimbangan Jaksa Penuntut Umum juga didasarkan pada dua aspek utama, yaitu objektif dan subjektif serta surat dakwaan yang sudah sesuai dengansyarat formil dan materiil. Aspek objektif merujuk pada Pasal 79 ayat (2) UU SPPA dan prinsip keadilan restoratif. Aspek subjektif mencakup usia anak, kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta sikap kooperatif selama proses hukum. Selain itu, faktor-faktor penghambat pertimbangan Jaksa Penuntut Umum disini adalah factor penegak hukum. Penerapan pidana di bawah minimum khusus merupakan bentuk keadilan substantif yang berorientasi pada masa depan anak dan reintegrasi sosial.

Jenni Aaustin

Saran dari penelitian ini menekankan prinsip keadilan restoratif dan asas *the best interest of the child*. Meskipun penuntutan di bawah batas minimum khusus diperbolehkan secara hukum, tuntutan yang diajukan harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak, usia, lingkungan sosial, serta rekomendasi dari BAPAS. Untuk itu, diperlukan dukungan sistem peradilan pidana anak yang memadai, termasuk penguatan peran lembaga seperti LPKA dan BAPAS, agar proses penuntutan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sejalan dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara efektif.

Kata Kunci: Penuntutan, Anak, Pelecehan, Jaksa.

ABSTRACT

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim)

Oleh

JENNI AGUSTIN

Law enforcement against children as perpetrators of sexual abuse offenses is carried out by maintaining a balance between legal certainty, justice, and the protection of children's rights. This research focuses on the legal grounds underlying the Public Prosecutor's decision to seek criminal charges below the statutory minimum against child perpetrators of sexual abuse, as well as the factors influencing such decisions.

This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through library research on statutory regulations and court decisions, as well as interviews with relevant law enforcement officials. The legal materials used include Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and other relevant secondary legal sources.

The findings indicate that the considerations of the Public Prosecutor in determining criminal charges must take into account various aspects, including juridical, sociological, and philosophical aspects, which serve as the theoretical framework of this study. The juridical aspect constitutes the primary basis for the Public Prosecutor's consideration, encompassing the obligation to ensure that the formulation of all applied legal provisions is appropriate. In addition, the Prosecutor's considerations are based on two main aspects, namely objective and subjective aspects, as well as the compliance of the indictment with formal and material requirements. The objective aspect refers to Article 79 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law and the principle of restorative justice. The subjective aspect includes the child's age, psychological condition, social environment, and cooperative attitude during the legal process. Furthermore, an inhibiting factor in the Prosecutor's consideration is related to law enforcement factors. The imposition of criminal sanctions below the statutory minimum

Jenni Agustin

constitutes a form of substantive justice oriented toward the child's future and social reintegration.

The recommendations of this study emphasize the principle of restorative justice and the best interest of the child. Although prosecution below the statutory

minimum is legally permissible, the charges filed must consider the child's psychological condition, age, social environment, and recommendations from the Community Guidance Center (BAPAS). Therefore, adequate support for the juvenile criminal justice system is required, including strengthening the role of institutions such as Juvenile Correctional Facilities (LPKA) and BAPAS, to ensure that the prosecution process is not merely normative but also aligned with the objectives of rehabilitation and effective social reintegration of children.

Keywords: Prosecution; Child; Abuse; Prosecutor.